

Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

¹Hilalludin

¹Universita Alama Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: hilalluddi34@gmail.com

Abstrak

Kebijakan moderasi beragama merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat harmoni sosial dan menjaga keberagaman di tengah masyarakat multikultural. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral sebagai instrumen pembentukan sikap keberagamaan peserta didik yang inklusif, toleran, dan berwawasan kebangsaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan dengan menelaah dokumen regulasi, kurikulum PAI, serta temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI masih menghadapi sejumlah tantangan, baik pada aspek konseptual, pedagogis, struktural, maupun kultural. Pemahaman guru PAI terhadap konsep moderasi beragama belum merata dan cenderung parsial, sehingga berdampak pada praktik pembelajaran yang masih bersifat normatif dan kognitif. Selain itu, keterbatasan perangkat pembelajaran kontekstual, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya dukungan kelembagaan turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Di sisi lain, integrasi moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka, penguatan pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital menjadi peluang strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan PAI. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan guru sebagai aktor kunci serta memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam di masa mendatang.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka

Abstract

Religious moderation policy is one of the Indonesian government's strategic agendas aimed at strengthening social harmony and managing religious diversity in a multicultural society. Within the context of national education, Islamic Religious Education (PAI) plays a pivotal role in shaping students' religious attitudes that are inclusive, tolerant, and aligned with national values. This article aims to analyze the implementation of religious moderation policy in PAI learning by employing the perspective of policy implementation theory. The study adopts a qualitative approach through policy analysis, examining regulatory documents, the PAI curriculum, and empirical findings from relevant previous studies. The analysis reveals that the implementation of religious moderation policy in PAI learning still faces various challenges, including conceptual, pedagogical, structural, and cultural dimensions. Teachers' understanding of religious moderation remains uneven and often partial, resulting in learning practices that are predominantly normative and cognitively oriented. Furthermore, limited contextual learning resources, insufficient continuous professional development, and weak institutional support hinder effective policy implementation. Nevertheless, the integration of religious moderation values into the Merdeka Curriculum, the strengthening of character education, and the utilization of digital learning technologies present significant opportunities to enhance policy implementation. This article argues that successful implementation of religious moderation policy in PAI learning requires an adaptive, participatory, and sustainable policy approach, positioning teachers as key policy actors while strengthening synergy among government institutions, educational stakeholders, and the wider community. The findings are expected to contribute both theoretically and practically to the future development of Islamic Religious Education policy.

Keywords: Religious Moderation, Education Policy, Islamic Religious Education, Policy Implementation, Merdeka Curriculum

PENDAHULUAN

Kebijakan moderasi beragama merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam merespons kompleksitas kehidupan beragama di tengah masyarakat yang plural, dinamis, dan terus mengalami perubahan sosial. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama, budaya, dan etnis yang tinggi menghadapi tantangan serius dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional. Dalam konteks ini, moderasi beragama diposisikan sebagai paradigma kebijakan yang menekankan sikap keberagamaan yang adil, berimbang, toleran, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta kebangsaan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif-ideologis, tetapi juga dirancang sebagai strategi preventif untuk mereduksi potensi konflik sosial, radikalisme, dan ekstremisme berbasis agama (Ar and Fauzan 2024).

Pendidikan nasional, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), menjadi salah satu arena paling strategis dalam mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Pendidikan dipahami sebagai ruang sosial yang memiliki daya transformasi tinggi dalam membentuk pola pikir, sikap, dan praktik keberagamaan generasi muda. PAI tidak sekadar berfungsi sebagai media transmisi ajaran keislaman, melainkan juga sebagai wahana pembentukan karakter religius yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa nilai-nilai Islam diajarkan secara kontekstual, inklusif, dan selaras dengan realitas masyarakat multikultural (Atika 2024).

Urgensi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI semakin menguat seiring dengan menguatnya berbagai tantangan sosial-keagamaan di era globalisasi dan digitalisasi. Arus informasi yang cepat dan tidak terfilter memungkinkan masuknya berbagai ideologi keagamaan yang cenderung eksklusif, tekstual, dan bahkan ekstrem ke ruang-ruang pendidikan. Dalam situasi tersebut, peserta didik berpotensi terpapar pada

pemahaman keagamaan yang sempit dan kurang dialogis. Jika tidak diimbangi dengan pembelajaran PAI yang berperspektif moderat, kondisi ini dapat berdampak pada terbentuknya sikap intoleran, penolakan terhadap perbedaan, serta melemahnya komitmen kebangsaan. Oleh karena itu, PAI dituntut untuk tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan dogmatik, tetapi juga menginternalisasikan nilai moderasi beragama melalui pendekatan pedagogis yang reflektif dan dialogis (Damayanti and Partono 2025).

Namun demikian, realitas implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI menunjukkan berbagai persoalan yang kompleks. Sejumlah penelitian dan laporan kebijakan mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan moderasi beragama sering kali dipahami secara abstrak dan simbolik, tanpa diterjemahkan secara operasional ke dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, dan sistem evaluasi. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung bersifat seremonial dan administratif, belum menyentuh substansi pembelajaran secara mendalam (Darmawan and Nugroho 2025).

Kesenjangan implementasi tersebut juga berkaitan erat dengan faktor aktor kebijakan, khususnya guru PAI sebagai pelaksana utama di ruang kelas. Tidak semua guru memiliki pemahaman konseptual yang memadai mengenai moderasi beragama, baik dari perspektif teologis maupun pedagogis. Sebagian guru masih memaknai moderasi beragama sebatas sikap toleransi antarumat beragama, tanpa mengaitkannya dengan prinsip keseimbangan (tawāzun), keadilan ('adālah), dan komitmen kebangsaan yang menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Selain itu, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, minimnya perangkat ajar yang kontekstual, serta tekanan administratif yang tinggi turut memengaruhi kualitas implementasi kebijakan di lapangan (Faridah and Rizqi 2025).

Di sisi lain, faktor struktural dan kultural juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Dukungan kelembagaan, kepemimpinan sekolah, serta budaya organisasi pendidikan sangat memengaruhi sejauh mana moderasi beragama dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran PAI. Dalam beberapa konteks sosial, kebijakan moderasi beragama bahkan menghadapi resistensi kultural akibat persepsi keliru yang menganggap moderasi sebagai upaya relativisasi ajaran agama atau pelemahan identitas keislaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama tidak dapat dipahami sebagai proses teknokratis semata, melainkan sebagai proses sosial yang sarat dengan dinamika ideologis dan kultural (Hayati et al. 2025).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan. Analisis difokuskan pada dinamika penerjemahan kebijakan dari level regulasi ke praktik pembelajaran, peran dan kapasitas aktor kebijakan, serta faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kebijakan Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran. Secara praktis, artikel ini diharapkan mampu memberikan refleksi kritis dan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, guru PAI, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat implementasi kebijakan moderasi beragama di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian analisis kebijakan pendidikan, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) (Sugari Dedi 20250. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji kebijakan sebagai proses sosial yang kompleks, mencakup dinamika aktor, interpretasi kebijakan, serta

konteks struktural dan kultural yang memengaruhi implementasi di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan sebagai kerangka konseptual untuk menelaah kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik pembelajaran PAI (Hilalludin 2025).

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap regulasi kebijakan moderasi beragama, kurikulum PAI, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan. Data primer diperoleh secara terbatas melalui refleksi praktik pembelajaran dan temuan empiris dari studi terdahulu yang mendukung analisis kebijakan (Hilalludin 2025). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara analitis dan reflektif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori untuk memastikan ketepatan dan kedalaman analisis (Hilalludin 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai tahapan krusial yang menjembatani kesenjangan antara formulasi kebijakan dan realitas praktik di lapangan. Kebijakan yang dirumuskan secara normatif dan ideal tidak secara otomatis menghasilkan dampak yang diharapkan apabila tidak didukung oleh mekanisme implementasi yang efektif. Perspektif ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar proses teknis-administratif, melainkan arena sosial yang sarat dengan interaksi aktor, kepentingan, interpretasi, serta konteks struktural dan kultural tempat kebijakan dijalankan (Hidayatulloh et al. 2023).

Teori implementasi kebijakan klasik, seperti model top-down yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi regulasi, serta struktur birokrasi yang kuat dalam memastikan keberhasilan implementasi. Dalam pendekatan ini, kebijakan moderasi beragama dipahami sebagai seperangkat regulasi dan

pedoman normatif yang harus diterjemahkan secara linear oleh aktor pelaksana di tingkat pendidikan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas, disosialisasikan secara sistematis, dan dikontrol melalui mekanisme birokrasi pendidikan (Iha Hamidah 2023).

Namun demikian, pendekatan top-down sering kali menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan kompleksitas praktik pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up, sebagaimana dikembangkan oleh Lipsky melalui konsep *street-level bureaucrats*, menjadi relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Pendekatan ini menempatkan guru PAI sebagai aktor kebijakan kunci yang memiliki ruang diskresi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pedagogis. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penafsir kebijakan yang memediasi antara tuntutan regulasi dan kebutuhan peserta didik (Jl 2024).

Dalam konteks kebijakan moderasi beragama, integrasi antara pendekatan top-down dan bottom-up menjadi sangat penting. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu dipahami sebagai kerangka normatif yang memberikan arah dan tujuan, sementara praktik pembelajaran PAI di kelas merupakan ruang implementatif yang menuntut fleksibilitas dan sensitivitas kontekstual. Moderasi beragama tidak dapat diimplementasikan secara seragam dan mekanis, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, lingkungan sosial sekolah, serta latar belakang budaya dan keagamaan masyarakat (Kariadi et al. 2023).

Secara konseptual, implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI juga dapat dianalisis melalui model implementasi interaktif yang menekankan hubungan timbal balik antara kebijakan, aktor, dan konteks. Model ini melihat implementasi sebagai proses dinamis yang melibatkan negosiasi makna antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Dalam

kerangka ini, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai nilai pedagogis yang harus diinternalisasikan melalui proses pembelajaran yang reflektif, dialogis, dan partisipatif (Malahayati et al. 2024).

Lebih lanjut, perspektif teori kebijakan pendidikan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan memiliki dimensi pedagogis yang tidak dapat dilepaskan dari praktik pembelajaran. Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam PAI menuntut adanya koherensi antara tujuan kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi. Moderasi beragama harus dioperasionalkan dalam capaian pembelajaran, materi ajar yang kontekstual, strategi pembelajaran berbasis dialog, serta evaluasi yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik.

Dalam kerangka ini, guru PAI berperan sebagai *policy mediator* yang menjembatani nilai-nilai normatif kebijakan dengan realitas empiris di kelas. Peran ini menuntut kompetensi pedagogis, pemahaman keislaman yang moderat, serta sensitivitas sosial yang tinggi. Guru tidak hanya menyampaikan materi ajar, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan peserta didik memahami keberagaman sebagai realitas sosial dan teologis. Dengan demikian, implementasi kebijakan moderasi beragama menjadi bagian integral dari proses pembelajaran PAI yang berorientasi pada pembentukan karakter religius yang inklusif dan berwawasan kebangsaan (Mas'ud 2025).

Selain faktor aktor, konteks kelembagaan dan sosial juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Teori institutionalism menegaskan bahwa struktur organisasi, budaya sekolah, kepemimpinan pendidikan, serta dukungan kebijakan di tingkat daerah memengaruhi sejauh mana moderasi beragama dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran. Sekolah yang memiliki iklim demokratis dan kepemimpinan yang inklusif cenderung lebih responsif terhadap implementasi kebijakan moderasi

beragama dibandingkan dengan sekolah yang berorientasi pada kepatuhan administratif semata (Mufidah 2025).

Dengan demikian, kerangka konseptual implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI harus dipahami secara holistik, dengan mempertimbangkan interaksi antara regulasi kebijakan, aktor pelaksana, praktik pedagogis, serta konteks sosial dan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif, sehingga dapat mengungkap dinamika implementasi kebijakan secara lebih mendalam dan komprehensif (Nyakcut et al. 2025).

Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, karena melibatkan interaksi antara aspek konseptual, pedagogis, struktural, dan kultural. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, tantangan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan dijalankan oleh para aktor pelaksana di tingkat pendidikan. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan moderasi beragama perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai proses sosial yang sarat dengan dinamika interpretasi dan kepentingan (Puspita Sari et al. 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan moderasi beragama adalah belum meratanya pemahaman konseptual guru PAI terhadap makna dan ruang lingkup moderasi beragama. Dalam kerangka teori policy interpretation, aktor pelaksana tidak sekadar menjalankan kebijakan secara literal, tetapi menafsirkan kebijakan sesuai dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang mereka miliki. Ketika moderasi beragama dipahami secara parsial misalnya hanya sebagai sikap

toleransi antarumat beragama maka implementasi kebijakan cenderung kehilangan dimensi substantifnya, seperti nilai keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*'adālah*), dan komitmen kebangsaan yang menjadi inti dari moderasi beragama dalam perspektif Islam dan kebijakan nasional (Sari et al. 2023).

Pemahaman yang terbatas tersebut berdampak langsung pada praktik pedagogis guru PAI. Dalam perspektif teori kurikulum, pembelajaran yang tidak didasarkan pada pemahaman konseptual yang utuh akan cenderung bersifat normatif dan repetitif. Guru lebih banyak menekankan aspek kognitif dan hafalan materi ajar, sementara dimensi afektif dan reflektif kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, moderasi beragama diperlakukan sebagai materi tambahan atau wacana normatif, bukan sebagai nilai yang terintegrasi dalam keseluruhan proses pembelajaran PAI (Suprapto 2020).

Selain faktor pemahaman guru, keterbatasan perangkat pembelajaran juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan. Materi ajar PAI masih didominasi oleh pendekatan tekstual dan doktrinal, dengan minim ruang dialog kritis dan kontekstualisasi sosial. Dalam perspektif pedagogi kritis, pembelajaran semacam ini berpotensi melanggengkan pola pikir pasif dan kurang reflektif pada peserta didik. Padahal, moderasi beragama menuntut proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan, merefleksikan realitas sosial, serta mengembangkan sikap keberagamaan yang dewasa dan bertanggung jawab. Tanpa pendekatan pedagogis yang dialogis dan partisipatif, nilai-nilai moderasi beragama sulit terinternalisasi secara mendalam.

Dari sudut pandang teori street-level bureaucracy (Lipsky), guru PAI dapat dipahami sebagai aktor kebijakan yang memiliki ruang diskresi dalam mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Namun, ruang diskresi tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor struktural, seperti beban administratif yang tinggi, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, serta minimnya pendampingan kebijakan dari otoritas pendidikan. Kondisi ini

menyebabkan guru cenderung mengadopsi strategi implementasi yang pragmatis dan minimalis, yaitu sekadar memenuhi tuntutan administratif tanpa mengembangkan inovasi pedagogis yang substansial (Suryadi 2022).

Peran aktor kebijakan lain, seperti kepala sekolah dan pengawas, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan moderasi beragama. Dalam perspektif teori kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun iklim sekolah yang inklusif dan moderat. Namun, dalam praktiknya, fungsi kepemimpinan ini sering kali tereduksi menjadi pengelolaan administratif dan pemenuhan standar formal. Pengawasan pendidikan yang lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan substansi pedagogis turut memperlemah implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI (Yanto et al. 2023).

Di tingkat makro, birokrasi pendidikan berperan sebagai penyusun regulasi dan fasilitator implementasi kebijakan. Namun, dalam perspektif teori koordinasi kebijakan, lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah sering kali menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi di tingkat satuan pendidikan. Sosialisasi kebijakan yang bersifat satu arah dan minim pendampingan kontekstual menyebabkan kebijakan moderasi beragama dipahami sebagai kewajiban formal, bukan sebagai kebutuhan pedagogis yang mendesak.

Dengan demikian, implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI menghadapi tantangan yang bersifat struktural, pedagogis, dan kultural. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas aktor pelaksana, penyediaan perangkat pembelajaran yang kontekstual, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Analisis ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan PAI harus dipahami sebagai proses transformatif yang menuntut sinergi antara kebijakan normatif dan praktik pedagogis di lapangan.

Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama

Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, pedagogis, kultural, dan ideologis. Dalam perspektif teori kebijakan publik, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan dengan nilai, keyakinan, dan realitas sosial masyarakat tempat kebijakan dijalankan (Yuyun Alfasius Tobondo 2025).

Secara kultural, moderasi beragama masih sering dipersepsi secara keliru sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran agama atau bahkan sebagai upaya melemahkan identitas keislaman. Dalam kerangka teori resistensi kebijakan, persepsi semacam ini dapat memunculkan penolakan laten terhadap kebijakan, baik dari kalangan pendidik, peserta didik, maupun masyarakat. Resistensi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka, tetapi dapat termanifestasi melalui sikap pasif, implementasi simbolik, atau pelaksanaan kebijakan yang bersifat formalitas semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari dinamika ideologis dan wacana keagamaan yang berkembang di masyarakat (Hayati et al. 2025).

Dari sisi struktural dan kelembagaan, tantangan implementasi kebijakan juga berkaitan dengan keterbatasan dukungan sistemik. Dalam perspektif teori kapasitas institusional, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi pelaksana, termasuk ketersediaan sumber daya manusia, perangkat pembelajaran, serta mekanisme pendampingan dan evaluasi. Di banyak satuan pendidikan, guru PAI masih menghadapi keterbatasan pelatihan substantif terkait moderasi beragama, sementara sistem pengawasan cenderung berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada penguatan kualitas pedagogis. Akibatnya, kebijakan

moderasi beragama belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya pembelajaran sekolah (Hidayatulloh et al. 2023).

Aspek pedagogis juga menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Dalam kerangka teori perubahan pendidikan, transformasi nilai moderasi beragama menuntut perubahan paradigma pembelajaran dari pendekatan transmisif menuju pendekatan transformatif. Namun, praktik pembelajaran PAI masih didominasi oleh metode ceramah dan pendekatan kognitif yang kurang memberi ruang bagi dialog, refleksi, dan pengalaman belajar yang bermakna. Tanpa perubahan pendekatan pedagogis, moderasi beragama berisiko dipahami sebagai wacana normatif yang tidak berdampak signifikan pada sikap dan perilaku peserta didik (Darmawan and Nugroho 2025).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI juga memiliki peluang strategis yang besar untuk diperkuat. Salah satu peluang utama adalah integrasi nilai moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pengembangan karakter, pembelajaran kontekstual, dan diferensiasi pembelajaran. Dalam perspektif teori kebijakan adaptif, fleksibilitas kurikulum membuka ruang bagi guru PAI untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan peserta didik, sekaligus menginternalisasikan nilai moderasi beragama secara lebih autentik (Damayanti and Partono 2025).

Selain itu, penguatan pendidikan karakter dan Profil Pelajar Pancasila memberikan kerangka normatif yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama, seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Sinergi antara kebijakan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan karakter menciptakan peluang untuk membangun ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan secara harmonis. Dalam perspektif teori sinergi kebijakan, keterpaduan antar

kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi dan mengurangi fragmentasi kebijakan di tingkat sekolah.

Pemanfaatan teknologi pembelajaran digital juga menjadi peluang penting dalam memperkuat implementasi kebijakan moderasi beragama. Dalam kerangka teori inovasi pendidikan, teknologi digital memungkinkan pengembangan media pembelajaran interaktif, diskusi lintas budaya, serta akses terhadap sumber belajar yang beragam dan kredibel. Jika dimanfaatkan secara tepat, teknologi dapat menjadi sarana strategis untuk memperluas wawasan keagamaan peserta didik dan membangun sikap moderat di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali tidak terfilter (Ar and Fauzan 2024).

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang tersebut, strategi implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI perlu diarahkan pada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas guru PAI melalui pelatihan berbasis kebutuhan, pengembangan perangkat ajar yang kontekstual dan dialogis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi langkah strategis yang mendesak. Dalam perspektif teori kolaborasi kebijakan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi di lapangan (Puspita Sari et al. 2024).

Dengan demikian, tantangan implementasi kebijakan moderasi beragama tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai ruang refleksi dan peluang untuk melakukan penguatan kebijakan Pendidikan Agama Islam secara lebih substansial. Pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas pedagogis menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik pembelajaran PAI di masa depan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya strategis dalam membangun sikap keberagamaan peserta didik yang inklusif, seimbang, dan berwawasan kebangsaan. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Tantangan utama terletak pada pemahaman konseptual guru PAI yang belum merata, kecenderungan pembelajaran yang masih normatif dan berorientasi kognitif, serta keterbatasan dukungan struktural dan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai moderasi beragama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap dan perilaku peserta didik, melainkan masih berada pada tataran pengetahuan normatif.

Di sisi lain, kebijakan moderasi beragama memiliki potensi besar untuk diimplementasikan secara lebih efektif seiring dengan penguatan Kurikulum Merdeka, pengembangan pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang inovatif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini menuntut pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan, dengan menempatkan guru PAI sebagai aktor kunci serta memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas pendidik, serta pendekatan pedagogis yang dialogis dan kontekstual, pembelajaran PAI berpotensi menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai moderasi beragama secara substantif, sehingga berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, Samsul, and Fauzan Fauzan. 2024. "Urgensi Media Animasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Pesantren Di Indonesia." *Al-Abshar: Journal of Islamic Education Management* 3 (2): 133–50. <https://doi.org/10.58223/al-abshar.v3i2.326>.
- Atika, Nur. 2024. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Kehidupan Moderasi Beragama Siswa." *Al-Miskawiah: Journal*

- of Science Education 2 (2): 337–54. <https://doi.org/10.56436/mijose.v2i2.299>.
- Damayanti, Devinta, and Partono Partono. 2025. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9 (2): 944–55. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1578>.
- Darmawan, Rivaldi, and Wahyu Budi Nugroho. 2025. "Pendidikan Moderasi Beragama: Kontribusi Pemikiran Islam Dan Kebangsaan Ahmad Syafii Maarif." *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 5 (1): 54–70. <https://doi.org/10.18196/jasika.v5i1.145>.
- Faridah, Zeni, and Ahmad Rizqi. 2025. "Dinamika Dan Tantangan Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam." *Journal of Transdisciplinary Studies in Religion and Education* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/10.63321/jtsre.v1i1.109>.
- Hayati, Zahrotul, Irfan Fadholi Putra, and Milana Abdillah Subarkah. 2025. "Perkembangan Islam Moderat Di Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama." *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 3 (2): 258–70. <https://doi.org/10.62083/w9wxxv67>.
- Hidayatulloh, Taufik, Hijrah Saputra, and Theguh Saumantri. 2023. "Peran Pesantren Tarekat Roudhoh Al-Hikam Dalam Mengembangkan Tradisi Intelektual Islam Dan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Dialog* 46 (1): 38–52. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.702>.
- Iha Hamidah. 2023. "Internalisasi Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Mengembangkan Sikap Moderasi Beragama Melalui Materi Toleransi Di SMA." *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1 (2): 235–46. <https://doi.org/10.58540/pijar.v1i2.416>.
- Jl, Suseil Mestaria. 2024. "IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA MELALUI MATERI AJAR MENGHARGAI DALAM KEBERAGAMAN PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Journal of Primary Education (JPE)* 4 (2): 61. <https://doi.org/10.29300/jpe.v4i2.7343>.
- Kariadi, Atman, Ahmad Khairul Nuzuli, and Winda Oktaviana. 2023. "KKN Moderasi Beragama: Membantu Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 2 (1): 263–68. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.160>.
- Malahayati, Putri, Indra Harahap, and Husna Sari Siregar. 2024. "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Respon Agama Islam Dan Kristen Terhadap Modernitas." *ANWARUL* 4 (1): 452–65. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2674>.
- Mas'ud, Mukhtar. 2025. "Implementasi Moderasi Beragama Bagi Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4 (7): 664–75. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4222>.
- Mufidah, Intan. 2025. "MODERASI BERAGAMA: STUDI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM SYAMSUL KURNIAWAN." *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman* 4 (1): 1–14. <https://doi.org/10.24260/jpkk.v4i1.4106>.

- Nyakcut, Zulkarnaini, and Mustamar Iqbal Siregar. 2025. "MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM ERA GLOBALISASI." *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (2): 1-26. <https://doi.org/10.59166/edumulya.v2i2.265>.
- Puspita Sari, Nina Ayu, M. Nasor, Rendra Nasrul Rifai, Esen Pramudya Utama, and Raicha Oktafiani. 2024. "Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Journal on Education* 6 (4): 21687-98. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6300>.
- Sari, Devi Indah, Ahmad Darlis, Irma Sulistia Silaen, Ramadayanti Ramadayanti, and Aisyah Al Azizah Tanjung. 2023. "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia." *Journal on Education* 5 (2): 2202-21. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.873>.
- Suprapto, Suprapto. 2020. "Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18 (3): 355-68. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750>.
- Suryadi, Rudi Ahmad. 2022. "IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20 (1): 1-12. <https://doi.org/10.17509/tk.v20i1.43544>.
- Yanto, Masti, Zeinal Abidin, St. Maizah, and Mahfida Inayati. 2023. "Tantangan Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3 (2): 252-57. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1343>.
- Yuyun Alfasius Tobondo. 2025. "Manajemen Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Sekolah." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3 (3): 48-63. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1066>.
- HILALLUDIN, H., & AKBAR, A. H. (2025). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI. *ABDUSSALAM: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam*, 1(2), 181-188.
- Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., & Maryani, E. D. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 15-29
- Hilalludin, H., & Khaer, S. M. (2025). Dinamika Study Literatur Hadits Priode Kelisanan Hingga Digitalisasi. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(1), 189-201.
- Permadi, M. A. M., & Hilalludin, H. (2025). Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Moderasi Beragama Di Era Globalisasi. *IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 1(03), 29-40.
- Haironi, A., Hilalludin, H., Atmaja, M. D. A. S., & Lawal, U. S. (2025). Orphan Education in the Perspective of the Qur'an and Educational Hadiths. *Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 36-43.